

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 17 No. 1 April 2024 Hal. 1 - 146

“ECOLOGICAL JUSTICE”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in
2. Dinal Fedrian

Penyunting:

1. Imran (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina (Hukum Pidana dan Perdata)
7. Rina Susani (Hukum Pidana)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar
2. Noercholysh
3. Wirawan Negoro
4. Didik Prayitno
5. Yuni Yulianita

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama
2. Widya Eka Putra

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“ECOLOGICAL JUSTICE ”

*E*cological Justice atau Keadilan Ekologis menyangkut pandangan bahwa makhluk selain manusia seperti hewan juga memiliki hak, misalnya atas habitat yang layak. Meskipun ini merupakan masalah perdebatan filosofis moral, pandemi COVID-19 yang telah berlalu menggambarkan perlunya visi untuk dunia yang adil untuk menempatkan kedudukan manusia dalam pendayagunaan alam. Deforestasi yang merajalela, perluasan pertanian yang tidak terkendali, pertanian intensif, pertambangan dan pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi spesies liar telah menciptakan ‘badai yang sempurna.’

Keadilan Ekologis tersusun atas dua istilah yakni keadilan dan ekologi. Istilah ekologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel sebagai *oekologie*. Dalam bahasa Yunani, ekologi terbagi menjadi *oikos* yang diartikan sebagai rumah atau lingkungan dan *logos* yang artinya ilmu atau pengetahuan. Dalam konteks lebih luas, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Pemakaian kata “ekologis” atau “ekologi” kemudian meluas untuk merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan hubungan dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup. Sementara itu, akar kata keadilan sendiri berasal dari kata ‘*justitia*’ yang merujuk pada konsep moral yakni pemberian hak dan kewajiban sesuai dengan norma. Dua konsep utama tersebut, yakni keadilan dan ekologi, bersama-sama merinci pada pandangan holistik terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam konteks lingkungan hidup.

Konsep keadilan ekologis pada dasarnya lebih mengarah kepada pemberian hak kepada semua entitas di ekosistem untuk dapat hidup dengan baik. Dapat dikatakan keadilan ekologis ini sebagai konsep baru dalam wacana konseptual tentang keadilan. Pemahaman bahwa ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik yang berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan merupakan pemantik munculnya konsep keadilan ekologis. Masyarakat dan kelompok-kelompok yang paling rentan sering kali juga yang paling terpuak oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, keadilan ekologis menekankan perlunya distribusi manfaat dan beban yang adil dalam kebijakan dan praktik lingkungan.

Dalam Jurnal Yudisial edisi ini, ada beberapa tulisan tentang permasalahan lingkungan yang berhadapan dengan hukum. Isu *global warming* bukan lagi sekadar isu isapan jempol belaka, melihat perubahan iklim yang semakin ekstrim saat ini. Hukum harus menjadi garda terdepan dalam melindungi masa depan negara. Tulisan dalam Jurnal Yudisial kali ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi para aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dalam menjalankan fungsinya, karena masih banyak ditemukan permasalahan lingkungan yang disepelekan

oleh oknum aparat penegak hukum, yang dampaknya mengakibatkan sengsara bagi lingkungan itu sendiri.

Dua tulisan lain menyinggung permasalahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun undang-undangnya sendiri sudah cukup lama disahkan, namun masih banyak permasalahan yang ditinggalkan, sehingga masih layak untuk ditelusuri lagi mengenai peraturan perundangan yang menyebabkan kontroversi tersebut. Tulisan terakhir mengangkat isu terkini, yakni tentang judi *online*. Semakin maraknya judi *online* ini menjadi perhatian, karena dampaknya yang merusak perekonomian perorangan, bahkan termasuk merugikan keuangan negara. Ketiga tulisan tersebut diharapkan dapat menjadi pelengkap tulisan yang menyangkut lingkungan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para penyusun undang-undang dan pengetuk palu keadilan dalam melihat permasalahan.

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN	1 - 22
Kajian Putusan Nomor 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL	
Nur Ansar	
Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta	
 PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP <i>IN DUBIO PRO NATURA</i>	 23 - 40
Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023	
Achmad Muchsin	
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid	
Pekalongan, Pekalongan	
 PEMAKNAAN SUBJEK DELIK DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN	 41 - 60
Kajian Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls	
Ilham Dwi Rafiqi	
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya	
 PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN	 61 - 80
Kajian Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK	
Resti Fauzi	
Alumni Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, Depok	
 PENGABAIAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	 81 - 105
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020	
Antoni Putra	
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang	
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELEBIHI KEWENANGAN	 106 - 127
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020	
A'an Efendi	
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	

Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Neisa Angrum Adisti, Mada Apriandi Zuhir, & Febrian

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 17 No. 1 April 2024

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Ansar N (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta)

Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan

Kajian Putusan Nomor 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

Jurnal Yudisial 2024 17(1), 1 - 22

Penelitian terkait pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi, berbagai penelitian tersebut cenderung dilakukan dalam kerangka berpikir bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang sejalan dengan pendefinisian dalam peraturan perundang-undangan tentang pendekatan keadilan restoratif. Namun, ada pendapat berbeda dari majelis hakim dalam Putusan Nomor 210/PID.B/2022/PN.Jkt.Sel yang mempertimbangkan keadilan restoratif, tetapi tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan putusan tersebut, permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, yaitu: bentuk penerapan keadilan restoratif dan apakah penerapannya sudah tepat. Untuk membahas permasalahan tersebut, akan diuraikan poin pertimbangan hakim, lalu menganalisisnya dengan teori atau norma hukum yang relevan, serta membandingkan pula dengan putusan hakim lainnya tentang keadilan restoratif dalam jenis tindak pidana yang sama. Di sini terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak melulu dimaknai sebagai mekanisme penghentian perkara sebagaimana ditemukan dalam putusan yang dianalisis. Bentuk penerapan tersebut tidak bertentangan dengan teori keadilan restoratif. Selain itu, terdapat pertimbangan serupa dalam berbagai putusan lainnya yang menerapkan keadilan restoratif, tetapi bukan sebagai penghentian perkara. Akan tetapi, adanya penerapan prinsip pendekatan keadilan restoratif masih minim dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam putusan yang bukan diarahkan untuk menghentikan perkara tetap sejalan dengan teori, namun tetap perlu mengedepankan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

(Nur Ansar)

Kata kunci: keadilan restoratif; mekanisme penghentian perkara; pendekatan retributif.

Muchsin A (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan)

Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip *In Dubio Pro Natura*

Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023

Jurnal Yudisial 2024 17(1), 23 - 40

Analisis Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 ini mengangkat satu permasalahan hukum, yaitu penerapan prinsip *in dubio pro natura* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara lingkungan hidup. Penelitian dilaksanakan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum ini diperoleh melalui studi dokumen. Oleh karena objek penelitian adalah putusan pengadilan, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan asas menggunakan teori prinsip *in dubio pro natura* dan teori pertimbangan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas *in dubio pro natura* di dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 didasarkan pada keyakinan awal hakim tentang adanya perbuatan melanggar hukum oleh tergugat. Para tergugat tidak melaksanakan perlindungan hutan yang berada di wilayah Hutan Konservasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, sementara potensi kerusakan lingkungan hidup

akibat perbuatan melanggar hukum mereka adalah nyata. Di sisi lain, hakim tidak menemukan alat bukti yang cukup berupa saksi dan/atau ahli atau akibat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dapat menentukan besaran ganti rugi kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melanggar hukum para tergugat. Dalam kondisi ini, prinsip <i>in dubio pro natura</i> dapat diterapkan. (Achmad Muchsin) Kata kunci: <i>in dubio pro natura</i>; pertimbangan hukum; penalaran hukum; pidana lingkungan hidup	seharusnya hakim membebaskan terdakwa. Hal tersebut seperti yang dilakukan hakim pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns dan Putusan Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw. Pemaknaan subjek delik yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah unsur “setiap orang” atau “orang perorangan” harus dimaknai secara khusus karena undang-undang ini tergolong sebagai <i>lex specialis</i>. Artinya, hakim dalam menilai ada tidaknya perbuatan perusakan hutan harus mengaitkan dengan unsur perbuatan yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki tujuan komersil. (Ilham Dwi Rafiqi) Kata kunci: pemaknaan; subjek delik; tindak pidana perusakan hutan.
Rafiqi ID (Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya) Pemaknaan Subjek Delik dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Kajian Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(1), 41 - 60 Tulisan ini dilatarbelakangi atas adanya Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls, yang merupakan putusan dalam tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat adat suku Sakai. Permasalahan yang utama adalah berkaitan dengan kontroversi pemaknaan subjek delik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dipahami dan diterapkan oleh hakim. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pemaknaan subjek delik tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus/putusan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan subjek delik bertentangan dengan prinsip pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, karena hakim mengesampingkan syarat adanya perbuatan perusakan hutan yang terorganisasi dan untuk tujuan komersil. Hakim juga mengesampingkan fakta-fakta non-hukum. Secara hukum dan fakta sosiologis terdakwa tidak termasuk pada kualifikasi subjek delik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sehingga	Fauzi R (Alumni Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, Depok) Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah dalam Peristiwa Kebakaran Hutan Kajian Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(1), 61 - 80 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul dari Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. Putusan itu merupakan putusan gugatan warga negara (<i>citizen lawsuit</i>) yang diajukan atas terjadinya peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana putusan atas gugatan warga negara (<i>citizen lawsuit</i>) dalam Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK; serta bagaimana implikasi hukum yang timbul dari putusan gugatan warga negara atas kebakaran hutan di Kalimantan Tengah berdasarkan Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat sepuluh bentuk perbuatan yang dilakukan pemerintah sehingga dinyatakan bersalah telah

melakukan perbuatan melawan hukum. Sepuluh perbuatan itu dibedakan ke dalam perbuatan yang terjadi sebelum kebakaran (<i>ex ante</i>), dan perbuatan yang terjadi pasca kebakaran (<i>ex post</i>). Analisis itu juga memberikan gambaran konsep <i>citizen lawsuit</i> yang dipraktikkan di Indonesia berbeda dengan <i>citizen lawsuit</i> di Amerika Serikat. Konsep di Indonesia, gugatan tidak dapat memuat tuntutan pembayaran ganti rugi, yaitu tidak dapat meminta ganti kerugian kepada pemerintah maupun kepada pelaku pembakaran, membatasi pihak tergugat hanya pemerintah, tidak dapat diajukan untuk pihak swasta atau orang-perorangan. Berdasarkan putusan tersebut, implikasi hukum yang timbul adalah pemerintah kehilangan hak gugat dalam kasus ini, sehingga pilihan menggunakan mekanisme gugatan <i>citizen lawsuit</i> dinilai kurang tepat. (Resti Fauzi) Kata kunci: gugatan warga negara; <i>ex ante</i>; <i>ex post</i>; perbuatan melawan hukum.	normatif tidak partisipatif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan yaitu: (1) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? dan (2) bagaimana seharusnya bentuk partisipasi masyarakat dalam perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja? Analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasilnya dapat ditarik dua kesimpulan. <i>Pertama</i>, adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, setidaknya meliputi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. <i>Kedua</i>, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara jelas telah mempertegas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat dalam perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja justru tidak pernah ada. Penerbitan perpu oleh pemerintah tanpa partisipasi masyarakat ini menjadikan sebuah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kehilangan makna karena tidak pernah dijalankan. (Antoni Putra) Kata kunci: partisipasi masyarakat; cipta kerja; omnibus.
Putra A (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang) Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(1), 81 - 105 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dalam proses pembentukannya. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Namun amanat putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dilaksanakan dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi. Pemerintah memilih mengeluarkan perpu, peraturan perundang-undangan yang secara	Efendi A (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember) Putusan Mahkamah Konstitusi Melebihi Kewenangan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(1), 106 - 127 Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar pokok permohonan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian formil undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini untuk menjustifikasi bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang melakukan tindakan <i>ultra vires</i> atau melampaui kewenangannya ketika memutus perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) apakah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melebihi batas kewenangan Mahkamah Konstitusi?; (2) apa implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi batas kewenangan berdasarkan undang-undang? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian menghasilkan dua simpulan. <i>Pertama</i>, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan <i>ultra vires</i> karena wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah jelas dan tidak ambigu, hanya untuk menyatakan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. <i>Kedua</i>, implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui wewenang merupakan putusan yang sah dan bukan batal demi hukum, karena tidak akan ada putusan pengadilan yang dapat menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi batal demi hukum. (A'an Efendi) Kata kunci: batas substansi wewenang; <i>ultra vires</i>; <i>non-ultra petita rule</i>.	mengakibatkan munculnya jenis tindak pidana <i>cyber crime</i>. Salah satu dari <i>cyber crime</i> adalah judi melalui media internet. Di Indonesia, isu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagai poin pertama dalam rumusan masalah. Kedua, hal lain yang dipertanyakan adalah apakah hakim dapat memutus perkara berbeda dengan pasal dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa poin permasalahan. Beberapa isu hukum dari putusan tersebut adalah pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu hakim tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang <i>concursum realis</i> dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. (Neisa Angrum Adisti, Mada Apriandi Zuhir, & Febrian)
Adisti NA., Zuhir AA., & Febrian (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi <i>Online</i> Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt. Utr <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(1), 128 - 146 Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan	Kata kunci: judi <i>online</i>; <i>concursum realis</i>; dakwaan alternatif.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Ansar N (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta)

Restorative Justice in Court Decisions

An Analysis of Decision Number 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2024 17(1), 1 - 22

Many studies have been conducted on the restorative justice approach in the criminal justice system in Indonesia. The studies tended to focus on the idea that restorative justice serves as a case settlement mechanism, as defined in the laws and regulations on restorative justice approaches. However, there was a dissenting opinion from the panel of judges in Decision Number 210/PID.B/2022/PN.Jkt.Sel, taking consideration on restorative justice, yet still punished the defendant. In light of this decision, this analysis addresses issues: the application of restorative justice and whether the application has been appropriate. In discussing these problems, points of consideration of judges should be elaborated, analyzed with relevant legal theories or norms, and then compared with other judges' decisions on restorative justice for the same type of crime. This shows that the restorative justice approach should not necessarily be defined as a case termination mechanism, as in the analyzed decisions. This implementation does not contradict the theory of restorative justice. There were similar considerations in other decisions applying restorative justice, but not as a termination of a case. In conclusion, the restorative justice approach in court decisions not directed at terminating cases remains in line with theory. Still, it needs to prioritize the importance of considering the principles of restorative justice.

(Nur Ansar)

Keywords: restorative justice; case termination mechanism; retributive approach.

Muchsin A (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan)

Judges Consideration of the Principle of In Dubio Pro Natura

An Analysis of Decision Number 359 K/TUN/TF/2023 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2024 17(1), 23 - 40

The analysis of the Supreme Court Decision Number 359 K/TUN/TF/2023 addressed one legal issue: the application of the in dubio pro natura principle as a judge's consideration in deciding on a state administrative dispute on the environmental law. The analysis was based on secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The two sources of legal materials were obtained through document studies. The research examined secondary data from primary and secondary legal materials obtained through document studies. Since the research object is a court decision, the analysis applied a statutory approach, a conceptual approach, and a principle approach using the theory of the principle of in dubio pro natura and the theory of legal considerations. The analysis results inferred that applying the in dubio pro natura principle in Supreme Court Decision Number 359 K/TUN/TF/2023 was based on the judge's initial finding of unlawful conduct committed by the defendants. The defendants did not protect forests in the Tesso Nilo National Park Conservation Forest area, while the potential for environmental damage due to their unlawful actions was obvious. Unfortunately, the judge did not find sufficient evidence, such as witnesses and/or experts, or the limited knowledge necessary to determine the amount of compensation for environmental damage caused by the defendant's unlawful acts. Under these conditions, the in dubio pro natura principle may be applied.

(Achmad Muchsin) Keywords: in dubio pro natura; legal considerations; legal reasoning; environmental disputes.	(Ilham Dwi Rafiqi) Keywords: meaning; subject offense; criminal offense of forest destruction.
Rafiqi ID (Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya) The Meaning of the Subject Offense in the Crime of Forest Destruction An Analysis of Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2024 17(1), 41 - 60 This article is motivated by Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls, regarding the criminal act of forest destruction committed by one of the indigenous people of the Sakai tribe. The main problem relates to the controversial meaning of the subject offense in Law Number 18 of 2013, as understood and applied by judges. For this reason, the issue discussed is the meaning of forestry criminal offenses in Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. The study employed normative legal research with statutory, case/decision, and conceptual approaches. It is shown that the judge's legal considerations in interpreting the subject offense are contrary to the principles in Law Number 18 of 2013, which ruled out the condition that there was an act of organized forest destruction for commercial purposes and also ruled out non-legal facts. Based on the legal and sociological facts, the defendant did not qualify as the subject offense based on Law Number 18 of 2013. Therefore, the judge should have acquitted the defendant. The same as what the judge did in the Watansoppeng District Court Decision Number 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns. and Banyuwangi District Court Decision Number 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw. The meaning of the subject offense should be based on Law Number 18 of 2013: "every person" or "individual person" must be interpreted specifically because this law is classified as <i>lex specialis</i>. It means that the judge must assess whether there has been an act of forest destruction by relating it to elements of an organized act with a commercial purpose.	Fauzi R (Alumni Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, Depok) Unlawful Acts by the Government in Forest Fire Incidents An Analysis of Decison Number 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2024 17(1), 61 - 80 This research aims to analyze the legal implications arising from Decision Nounber 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK, which is a citizen lawsuit filed over the occurrence of forest fires in Central Kalimantan in 2015. The problem is formulated as follows: how is the verdict on a citizen lawsuit in Decision Number 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK; and what are the legal implications of that verdict based on Decision Number 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. The study employed normative legal research methods by collecting data through library research. The analysis result showed that ten acts committed by the government were deemed unlawful. These acts are categorized into those that occurred before the fire (<i>ex ante</i>) and after the fire (<i>ex post</i>). The analysis also provides an overview of citizen lawsuits practiced in Indonesia, which are different from those in the United States. In Indonesia, such lawsuits cannot include compensation claims; thus, claimants cannot seek damages from the government or the perpetrators of the fires, and the lawsuit is limited to the government as the defendant, excluding private parties or individuals. Based on this decision, the legal implication is that the government lost its right to sue in this case, so using the citizen lawsuit mechanism is considered inappropriate. (Resti Fauzi) Keywords: citizen lawsuit; <i>ex ante</i>; <i>ex post</i>; unlawful act.

Putra A (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang) The Negligence of Public Participation Principle in Job Creation Law An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2024 17(1), 81 - 105 The Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional for having a formal defect in its legal formation process. Nevertheless, the Constitutional Court gave the lawmakers a two-year opportunity to improve it by constructively involving the public's participation. However, the Constitutional Court's decision was not implemented with the excuse to fill a legal vacuum that could potentially cause an economic crisis. The government instead chose to issue a government regulation in lieu of law (perpu), a normatively non-participatory form of legislation. Accordingly, the analysis formulated two key questions. First, what was the form of public participation in the Constitutional Court decision? And, secondly, what should be the form of public participation in improving the Job Creation Law? The research analysis employed juridical-normative research methods. Two conclusions could be drawn as the result. At the outset, there should be meaningful public participation in improving the Job Creation Law, which includes the right to be heard, the right to have their opinions considered, and the right to receive explanations or answers to the given opinions. Then, although the Constitutional Court decision clearly emphasizes the importance of public participation in making the law, there has never been any public participation in the revision of Job Creation Law. The government's issuance of perpu without public participation has defied the Constitutional Court's final and binding decision. Therefore, the ruling lost its significance as it was never implemented. (Antoni Putra)	Keywords: public participation; job creation; omnibus. Efendi A (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember) Constitutional Court Decision Exceeds Authority An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2024 17(1), 106 - 127 Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 in the main points of the petition in the third, fourth, and fifth dictums exceeds the authority of the Constitutional Court in deciding cases of formal judicial review of laws, as stipulated in Article 51A paragraph (4) jo. Article 57 paragraph (2) of the Constitutional Court Law. This research justifies the Constitutional Court's prohibition from doing ultra vires or exceeding its authority when deciding a law review case. Based on this background, it aims to answer two questions: (1) does Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 exceed the authority of the Constitutional Court?; (2) what are the legal implications of the Constitutional Court's decision that exceeds the authority based on the law? The study produces two conclusions using a doctrinal legal research type with a statutory approach and a case approach. First, Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is an ultra vires decision because the authority of the Constitutional Court is based on Article 51A paragraph (4) jo. Article 57 paragraph (2) of the Constitutional Court Law has been plain and unambiguous, only stating that the formation of laws does not fulfill the provisions for the formation of laws based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and that the law itself does not have binding legal force. Second, the legal implications of the Constitutional Court's decision that exceeds its authority are valid decisions and are not null and void because no court decision can declare them null and void. (A'an Efendi) Keywords: limit of authority substance; ultra vires; non-ultra petita rule.
--	---

Adisti NA., Zuhir AA., & Febrian (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang)

Judge's Considerations in Online Gambling Case Decision

An Analysis of Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2024 17(1), 128 - 146

Information technology and communication development have transformed society's behaviors and human civilization, causing the emergence of cyber crimes. One of the cyber crimes is online gambling. In Indonesia, this issue is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law 19 of 2016. This analysis examines the North Jakarta District Court Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr concerning the crime of gambling. This study explores the judges' legal considerations related to the crime of gambling in judgment as the first point in the problem formulation. The second point in question is whether the judge could decide the case differently from the article of charge. This analysis employs a normative legal research method using secondary data with a case approach and a statutory approach. Several points can be drawn from the analysis. Some of the legal issues from the decision were incorrect articles of charges, meaning that the judge did not formulate the articles of gambling in Article 27 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 65 of the Criminal Code concerning *concurus realis* in the charges, prosecutions, and decisions. The articles must be formulated precisely and meticulously because errors in formulating articles in charge could have significant implications for the trials.

(Neisa Angrum Adisti, Mada Apriandi Zuhir, & Febrian)

Keywords: online gambling; *concurus realis*; alternative charges